

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang tumbuh pesat, mengakibatkan persaingan antara perusahaan semakin ketat. Masing-masing perusahaan akan mencoba berbagai kebijakan dan strategi agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang. Strategi sangat dibutuhkan, namun untuk menjalankan strategi membutuhkan modal yang tidak sedikit. Berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal ini, salah satu alternatifnya adalah dengan meminjam pada pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti lembaga keuangan (perbankan).

Bank berperan untuk memberikan bantuan dana (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah satu manfaat dari pemberian kredit bagi bank yang paling utama yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit itu terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, hal ini penting untuk kelangsungan hidup bank tersebut. Salah satu kredit yang disalurkan oleh bank adalah kredit modal kerja yang menunjukkan sejumlah dana yang tertanam pada aktiva lancar yang akan dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas usaha.

Kredit modal kerja merupakan kredit untuk perorangan atau sebuah badan usaha lainnya yang ingin mengembangkan usahanya dengan syarat sudah memiliki perijinan usaha dan usaha sudah berjalan selama kurang lebih satu tahun. Karena memang banyak para wirausahawan yang masih memiliki modal minim untuk mengembangkan usahanya, maka kredit modal kerja pun bisa dijadikan pilihan agar bisnis yang dijalankan semakin besar.

Pemberian kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang menghasilkan pendapatan bagi perusahaan dan merupakan salah satu bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, namun disisi lain pemberian kredit memiliki risiko. Salah satu risiko dari pemberian kredit modal kerja adalah munculnya kredit bermasalah (*Non*

Performing Loan). *Non Performing Loan* merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Semakin tinggi *Non Performing Loan* suatu perusahaan perbankan akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Oleh karena itu pemberian kredit modal kerja harus dilaksanakan dengan cermat dan tepat, dan dilaksanakan oleh pegawai kredit yang mengerti dan memahami mengenai dasar-dasar perkreditan.

Untuk mengatasi adanya kredit bermasalah maka perlu untuk melakukan analisis pengendalian intern sebelum dilakukannya suatu pemberian kredit. Pengendalian intern (Sukrisno Agoes 2008:79) adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan, seperti keandalan laporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dari pengendalian intern adalah menjamin manajemen agar tujuan perusahaan yang ditetapkan tercapai, laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya, kegiatan perusahaan sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga aktiva perusahaan dengan memperkecil kemungkinan kesalahan penyajian data akuntansi, memperkecil kemungkinan adanya penyelewengan dan penggelapan, serta meningkatkan efisiensi kerja dan mencegah terjadinya pemborosan.

Untuk menciptakan pengendalian intern yang baik dalam perusahaan, maka ada empat unsur pokok yang harus dipenuhi (Mulyadi; 2009:166) yaitu struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas; sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, dan pendapatan biaya; praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi; dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pengendalian intern kredit adalah usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Lancar dan produktif artinya dapat ditarik kembali bersama bunganya sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak. Pihak bank selaku kreditur yang memberikan kredit terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan analisis prinsip kehati-hatian 5C. Analisis 5C (Kasmir; 2012:95) tersebut adalah *Character* (sifat atau watak calon debitur), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Condition* (kondisi), dan *Colleteral* (jaminan).

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian internal. Manajemen memantau pengendalian internal untuk mempertimbangkan apakah pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya. Pemantauan mencakup penentuan desain dan operasi pengendalian tepat waktu dan tindakan perbaikan yang dilakukan. Proses ini dilaksanakan melalui aktivitas pemantauan secara terus menerus, evaluasi secara terpisah, atau suatu kombinasi diantara keduanya.

Penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: *Rescheduling*, merupakan suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. *Reconditioning*, maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada. *Restructuring*, merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan menambah modal dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan memang usaha yang dibiayai memang masih layak.

PT. BPR Mitra Rakyat Riau merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang beroperasi di Pekanbaru. Perkreditan merupakan kegiatan yang penting bagi PT. BPR Mitra Rakyat Riau karena kredit juga merupakan salah satu sumber dana yang penting untuk setiap jenis usaha. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga perbankan yang menghimpun dana dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkan dana dalam

bentuk kredit dan menempatkan dana pada bank lain. Tujuan dari BPR Mitra Rakyat Riau ini adalah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi masyarakat, pengusaha kecil dan mikro yang bermanfaat bagi penguatan dan pengembangan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam kegiatan penyaluran pinjaman kredit modal kerja pihak PT. BPR Mitra Rakyat Riau menetapkan prosedur dan syarat yang harus diikuti oleh calon debitur yaitu dengan menganalisa setiap pemohon kredit yang masuk sebelum akhirnya dilakukan proses yang lebih lanjut. Adapun prosedur pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau adalah:

Tahap pertama, calon debitur mengajukan permohonan kredit kepada *Account Officer*. Formulir ini wajib diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon debitur pada saat pertama kali mengajukan permohonan kredit dengan melampirkan persyaratan kredit yang harus dipenuhi.

Tahap kedua, permohonan kredit beserta berkas-berkasnya disampaikan kepada *Account Officer* untuk mendapatkan pertimbangan dan meneliti seperlunya apakah permohonan kredit modal kerja layak untuk dianalisa atau tidak. Adapun dokumen-dokumen yang harus dilengkapi seperti: fotocopy KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah, Surat Keterangan Usaha Dari Instansi Terkait, dan NPWP.

Tahap ketiga, *Account Officer* wajib memperoleh informasi dan data yang lengkap untuk keperluan analisa. Bagian *Account Officer* melakukan pemeriksaan kelengkapan atas berkas-berkas yang diajukan oleh calon debitur dan dilakukan wawancara kepada calon debitur. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dari calon debitur mengenai usaha, kemampuan membayar, dan menilai bagaimana watak dan karakter dari calon debitur.

Tahap keempat, *Account Officer* memproses permohonan kredit yang diajukan calon debitur dengan melakukan penganalisaan dan survey kelapangan (*on the spot*). Analisis kredit yang dilakukan oleh *account officer* untuk menilai kelayakan kredit.

Tahap kelima, Komite Kredit mengadakan rapat untuk mengambil keputusan apakah menyetujui atau menolak permohonan kredit. Apabila keputusan Komite Kredit menolak permohonan tersebut, maka berkas permohonan dikembalikan ke *Account Officer* untuk disampaikan pemberitahuan penolakan secara tertulis kepada pemohon. Apabila keputusan Komite Kredit menyetujui permohonan tersebut, maka berkas permohonan di serahkan ke bagian Administrasi Kredit.

Tahap keenam, Administrasi Kredit melakukan persiapan perjanjian dan pengikatan penandatanganan perjanjian kredit, pengikatan dan dokumentasi merupakan tanggung jawab bagian legal. Setelah seluruh proses administrasi selesai dan lengkap, maka dilakukan pencairan kredit.

Sebelum memberikan pinjaman kredit modal kerja, PT. BPR Mitra Rakyat Riau harus melakukan penilaian dengan cermat dan seksama agar penyaluran kredit tersebut tepat sasaran, sehingga perlu dilakukan prinsip kehati-hatian melalui analisa yang tepat cermat serta dilakukan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah sesuai syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap supaya kredit yang disalurkan tersebut dapat kembali dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah yang meliputi pinjaman pokok dan bunga.

Setelah menjalankan prosedur prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit modal kerja yang dilakukan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau, namun masih timbul masalah yang dihadapi dalam pemberian kredit modal kerja yang dijalankan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau ini seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1
PT. BPR MITRA RAKYAT RIAU

Kolektabilitas Kredit Modal Kerja Tahun 2015
(Dalam Satuan Ribuan)

Jenis Kredit	Debitur	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Persentase (%)
PL (Performing Loan)				
Lancar	107	2.886.177.379	1.800.397.852	31,34%
Jumlah PL	107	2.886.177.379	1.800.397.852	31,34%
NPL (Non Performing Loan)				
Kurang Lancar	19	519.183.401	334.928.687	5,83%
Diragukan	23	871.264.407	479.827.188	8,35%
Macet	61	4.112.598.942	3.129.089.932	54,47%
Jumlah NPL	103	5.503.046.750	3.943.845.807	68,66%
JUMLAH	210	8.389.224.129	5.744.243.659	

Sumber : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Tabel I.2
PT. BPR MITRA RAKYAT RIAU
Kolektabilitas Kredit Modal Kerja Tahun 2016
(Dalam Satuan Ribuan)

Jenis Kredit	Debitur	Plafond (Rp)	Baki Debet (Rp)	Persentase (%)
PL (Performing Loan)				
Lancar	56	2.099.177.379	1.389.738.614	30,42%
Jumlah PL	56	2.099.177.379	1.389.738.614	30,42%
NPL (Non Performing Loan)				
Kurang Lancar	7	215.333.201	59.966.603	1,31%
Diragukan	7	341.500.000	222.528.460	4,87%
Macet	68	3.783.314.607	2.896.145.893	63,40%
Jumlah NPL	82	4.340.147.808	3.178.640.956	69,58%
JUMLAH	138	6.439.325.187	4.568.379.570	

Sumber : PT. BPR Mitra Rakyat Riau

Menurut Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat(2010:32)menjelaskan bahwa plafon adalah jumlah maksimum fasilitas kredit yang disediakan untuk nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Baki debet adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jenis kredit menurut kualitas terdiri dari ; (1) kredit *performing* yaitu kredit dengan kualitas lancar; (2) kredit *non performing* yaitu kredit

dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Adapun kredit yang disalurkan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau selama dua periode yaitu pada tahun 2015 dengan jumlah plafond sebesar Rp 8.389.224.129 dan pada tahun 2016 dengan jumlah plafond sebesar Rp 6.439.325.187. NPL Bank BPR Mitra Rakyat Riau mengalami perubahan setiap tahunnya yaitu jumlah kredit kurang lancar pada tahun 2015 sebesar 5,83% menurun pada tahun 2016 sebesar 1,31%. Jumlah kredit diragukan pada tahun 2015 sebesar 8,35% menurun pada tahun 2016 sebesar 4,87%. Sedangkan jumlah kredit macet pada tahun 2015 sebesar 54,47% meningkat pada tahun 2016 sebesar 63,40%. Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah NPL dari tahun 2015 meningkat di tahun 2016 yaitu sebesar 68,66% menjadi 69,58%.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/II/2/2013 Bab II Pasal 4 ayat 1 yaitu Bank Indonesia menetapkan bank dalam pengawasan intensif jika

dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya jika memenuhi salah satu kriteria yaitu rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan) secara netto lebih dari 5% dari total kredit maka Bank BPR Mitra Rakyat Riau telah mengindikasikan adanya pengawasan intensif dari Bank Indonesia.

Meningkatnya jumlah NPL menunjukkan bahwa kurang efektifnya penerapan pengendalian intern serta pengawasan yang kurang maksimal yang dilakukan oleh PT. BPR Mitra Rakyat Riau. Hal ini bisa mengakibatkan timbulnya kredit bermasalah terus-menerus sehingga pada akhirnya akan menyulitkan kelangsungan usaha bank yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pengendalian intern dalam pemberian kredit dengan judul: “**Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau.**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimana efektifitas pengendalian intern pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau.”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas pengendalian intern terhadap pemberian kredit modal kerja pada PT. BPR Mitra Rakyat Riau.

2. Manfaat Penelitian

- a.** Bagi penulis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta dapat dijadikan sumber informasi tentang pengendalian intern dalam penyaluran kredit modal.
- b.** Bagi perusahaan, diharapkan dapat dijadikan sebagai koreksi ataupun sumbangan pemikiran untuk dapat memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern terhadap pemberian kredit modal kerja pada perusahaan tersebut.
- c.** Bagi peneliti berikutnya, dapat dijadikan sumber informasi dan bahan acuan dalam penelitian dimasa yang akan datang didalam bidang yang sama.

D. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Mengemukakan tinjauan pustaka yang berhubungan dengan penulisan serta hipotesis.

BAB III :METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang metode dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Menjelaskan secara singkat gambaran singkat identitas responden yang berisikan tingkat umur responden, tingkat pendidikan responden, model usaha responden, dan jumlah pegawai.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

